

Aktor Penghubung Dalam *Modular Parties*

I Gusti Ayu Sintya Dewi Suteja¹, Bandiyah², I Ketut Putra Erawan³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: sintyasuteja59@gmail.com¹, dyah_3981@yahoo.co.id², ketut.erawan@ipd.or.id³

ABSTRACT

This study aims to determine the relationship between PKS and Bambang Santoso with mass mobilization through Mudjiono in the Legislative Election 2019. This study uses the Modular Parties theory by Novaes to see brokers as free agents who can mobilize their voter linkages because they receive more profitable proposals. The research method used is descriptive qualitative using primary data and secondary data because the topic is complex and closely related to social interaction. The results of this study are: first, when there is a conflict within the PKS, the relationship that exists between the PKS and Mudjiono is no longer mutually beneficial, so Mudjiono chooses to leave and has a detrimental impact on the PKS. Second, Mudjiono's relationship with Bambang Santoso is mutually beneficial because Bambang Santoso gets votes from Mudjiono's voter network, while for Mudjiono, the closer he is to power, the stronger his position as a broker.

Keywords: *Mudjiono, Broker, Modular Parties, Legislative Election in 2019*

1. PENDAHULUAN

Sejak kemunculannya, PKS menjadi partai islam yang diperhitungkan karena mampu bertahan di tengah gempuran partai nasionalis. PKS mencitrakan partainya sebagai partai eksklusif dengan Gerakan Tarbiyah. Namun, seiring berjalannya waktu, PKS mengalami gejolak karena adanya perbedaan pandangan diantara pengurus PKS sehingga terjadi konflik internal pada partai. Konflik yang terjadi di tubuh PKS, khususnya di Bali, muncul akibat dilantiknya pengurus baru yang ditunjuk oleh DPP PKS yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur kepartaian. Dalam hal ini, Mudjiono yang merupakan ketua PKS Bali dan telah megabdi selama 18 tahun di PKS merasakan dampak dari *re-shuffle* kepemimpinan yang dilakukan secara mendadak. Imbasnya, Mudjiono serta 4.600 kader dan pengurus partai PKS di Bali melakukan mundur massal.

Dibawah pimpinan Mudjiono, PKS mendapatkan mayoritas suara dari masyarakat muslim yang mengidentifikasi dirinya sebagai minoritas. Selain itu, Mudjiono juga berhasil menjadikan PKS unggul dibandingkan partai islam lainnya di Kota Denpasar. Terlihat dari jumlah kader PKS yang berhasil masuk jajaran anggota DPRD Kota Denpasar pada pemilihan legislative selalu lebih unggul dibandingkan partai islam lainnya.

Pada tahun 2014, PKS berhasil meloloskan 3 kadernya di DPRD Kota Denpasar yakni Hilmun Nabi dari Dapil 1, Drs. Umar Dany dapil 3 dan Muhammad Nuh Fatah, S.H. dari dapil 5. PKS berhasil memenangkan pertarungan legislatif dengan suara terbanyak di 2 TPS (Tempat Pemungutan Suara) di Desa Wanasari (Kampung Jawa) Kecamatan Denpasar Utara mengalahkan partai PDIP yang memiliki basis suara di Bali.

Pada tahun 2019, PKS kembali mengusulkan 2 nama petahannya yakni Umar Dany dan Muhammad Fatah untuk bersaing di pemilihan legislatif Kota Denpasar tahun 2019. Masing-masing calon petahana mendapatkan nomor urut 1 ketika pemilihan. Namun hal tersebut tidak memberi pengaruh karena nyatanya perolehan suara yang didapat baik oleh partai dan juga Umar Dany terdapat penurunan suara yang signifikan, walaupun Nuh Fatah mengalami peningkatan suara namun pada akhirnya tetap tidak cukup untuk menghantarkannya menjadi anggota DPRD Kota Denpasar.

Setelah mengalami peningkatan pada pileg 2014, PKS nyatanya tidak berhasil mempertahankan suaranya dan harus legowo dengan tidak adanya kader yang berhasil lolos ke DPRD Kota Denpasar pada pileg 2019. Berubahnya komposisi pemenang dalam pemilihan legislatif juga mencerminkan berjalannya mesin demokrasi. Hal ini menunjukkan loyalitas masyarakat terhadap partai sangatlah dinamis, mudah berubah-ubah. Kegagalan PKS juga tidak terlepas dari mobilisasi massa yang dilakukan Mudjiono kala keluar dari kepengurusan PKS.

Selama masa pemilu 2019, Mudjiono tidak bergabung dengan partai politik manapun, tetapi memilih untuk bergabung menjadi tim pemenangan Bambang Santoso yang merupakan calon DPD RI 2019. Dengan bergabungnya Mudjiono dalam tim pemenangan, Bambang Santoso berhasil membawa kemenangan pada pemilihan DPD RI Dapil Bali yang sebelumnya tidak pernah diwakili oleh tokoh non-Hindu dalam parlemen. Menariknya, Bambang Santoso

yang dikenal sebagai tokoh muslim plural berhasil mengalahkan 18 pesaingnya yang notabene berasal dari kaum mayoritas Hindu Bali dan mampu menduduki kursi DPD RI dengan perolehan 126.100 suara. Perolehan 3 suara tertinggi Bambang Santoso terdapat di Kota Denpasar, Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Buleleng.

Berangkat dari latar belakang inilah, peneliti tertarik membahas mengenai hubungan antara PKS dan Bambang Santoso dengan Mudjiono yang merupakan aktor penghubung dalam mobilisasi massa. Peneliti meneliti dari sudut aktor penghubung dalam sistem kepartaian yang modular di tengah masyarakat yang berorientasi identitas dengan judul penelitian "Aktor Penghubung dalam *Modular Parties*".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Modular Parties

Penelitian ini menggunakan Teori Modular Parties oleh Lucas Martins Novaes. *Modular parties* memiliki ciri khas yakni tidak secara langsung memiliki koneksi dengan pemilihnya. Alih-alih membentuk pengikut setia dan memperkuat hubungan eksklusif dengan pemilih, *modular parties* lebih mengandalkan agen luar untuk membantunya dalam memobilisasi pemilih. *Modular parties* cenderung memanfaatkan kepala adat, tokoh organisasi masyarakat, pemimpin etnis, pejabat lokal ataupun tokoh-tokoh lokal lainnya karena pada dasarnya, tokoh-tokoh ini telah memiliki modal politik yang besar berupa jaringan sosial secara pribadi. Jaringan sosial inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak modular untuk memenangkan pemilu. Tokoh

lokal bertindak sebagai patron bagi pemilih dan aktor penghubung bagi partai. Dalam *modular parties*, aktor penghubung merupakan agen bebas sehingga dapat beralih pada pihak yang mampu memberikan mereka tawaran yang lebih menguntungkan.

Tokoh lokal atau aktor penghubung adalah pemilik yang sah dari jaringan pemilih ini dan aktor penghubung dapat menempatkan jaringan pemilih otonom mereka kepada pihak berbeda dari waktu ke waktu. Ini membuktikan bahwa aktor penghubung merupakan agen yang bebas. Alhasil, baik pemilih ataupun partai tidak memiliki alasan untuk menjalin hubungan jangka panjang. Pemilih “terikat” pada partai hanya karena hubungan yang dimilikinya dengan aktor penghubung sehingga pilihan pemilih dapat berubah-ubah.

Konsep Patron-Klien

Menurut Novaes (2015), hubungan patron-klien adalah hubungan timbal balik dan sukarela antara individu yang memiliki akses asimetris ke sumber daya. Hubungan ini bersifat timbal balik karena baik patron maupun klien bertransaksi dari sesuatu yang mereka inginkan.

Novaes juga menyebutkan bahwa tokoh lokal merupakan patron sesungguhnya dalam *modular parties*. Tokoh lokal tetap dapat mempertahankan assetnya, dalam hal ini klien, meskipun ada gejolak di tingkat atas. Hubungan antara tokoh lokal dan klien tidak bergantung pada preferensi partisan dan hubungan ini tetap kokoh bahkan setelah tokoh lokal mengalihkan suaranya pada pihak baru.

Konsep *Inaction* Sebagai *Action*

Inaction mengacu pada bentuk ketika pembuat kebijakan “tidak melakukan apa-apa” terhadap masalah sosial. Connell dan Hart (2019) dalam tulisannya yang berjudul *Inaction and Public Policy* memiliki pandangan yang sama terhadap argument bahwa *inaction* juga merupakan bagian dari *action* atau tindakan. Lebih lanjut, Connell dan Hart mendefinisikan *inaction* sebagai contoh dan atau pola non-intervensi oleh individu pembuat kebijakan, organisasi publik, pemerintah atau jaringan kebijakan dalam menangani masalah yang merupakan potensi dalam yurisdiksi mereka namun potensi intervensi kebijakan yang masuk akal tidak terjadi.

Terdapat lima bentuk *inaction* yang disebutkan oleh Connell and Hart, yakni :

1. *Calculated inaction*: *inaction* sebagai produk dari kesadaran (strategis dan taktis) pilihan untuk tidak bertindak atau tidak bertindak saat ini.
2. *Ideological Inaction*: *inaction* berdasarkan pada pendirian atau keyakinan.
3. *Imposed Inaction*: *inaction* sebagai bentuk penerimaan pragmatis bahwa syarat dukungan dari aktor yang kuat dan institusi yang penting tidak akan didapatkan.
4. *Reluctant Inaction*: *inaction* dapat terjadi ketika pilihan kebijakan yang layak, alat dan sumber daya untuk menangani masalah tertentu tidak tersedia.

5. *Inadvertent Inaction*: *inaction* dapat muncul dari proses kognitif pembuat kebijakan dalam mengatasi berbagai hal, data dan informasi yang banyak serta ambigu.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder. Penggunaan metode ini dirasa paling tepat karena topik mengenai aktor penghubung dalam *modular parties* merupakan hal yang sifatnya kompleks, sukar diukur dengan angka dan berhubungan erat dengan interaksi sosial serta proses sosial.

Penelitian ini menggunakan teknik non probabilitas. Adapun informan kunci pada penelitian ini adalah Mudjiono dan informan utama adalah Muhammad Taha yang merupakan ketua relawan Bambang Santoso di Kota Denpasar serta Ilham Ahmad selaku Ketua DPD PKS Kota Denpasar. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah PKS

Deklarasi Partai Keadilan (PK) di Provinsi Bali dilakukan di Gedung Wanita Shanti Graha di jalan Sudirman (Harefa, 2019: 39). Pada pemilu tahun 1999, PK tidak mampu memenuhi ambang batas parlemen sebesar 2% sehingga mengharuskan PK berganti nama serta lambang untuk dapat mengikuti pemilu tahun 2004, selanjutnya nama Partai Keadilan Sosial (PKS) secara resmi digunakan sejak 2 Juli 2003. PKS

mencitrakan partainya sebagai partai eksklusif dengan Gerakan Tarbiyah dengan basis tradisional kaum muda, terdidik, dan masyarakat perkotaan tapi kemudian bertaruh menjadi partai inklusif (terbuka).

Profil Mudjiono

Mudjiono dulunya pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Denpasar periode 2004-2009 dan 2009-2014. Ia juga menjabat sebagai Ketua DPW Partai PKS periode 2010-2015 dan 2015-2018. Setelah keluar dari PKS, ia membuat partainya sendiri dan menjadi Ketua DPW Partai Gelora Bali. Selain terlibat aktif di dunia politik, Mudjiono juga banyak mengambil peran di kemasyarakatan seperti menjadi Ketua Dewan Pembina Sekolah Mutiara Bali, Ketua Dewan Pembina Yayasan Albanna Kota Denpasar dan Ketua Dewan Pembina Dompot Sosial Madanni Bali.

Profil Bambang Santoso

Bambang Santoso merupakan satu-satunya calon yang beragama islam pada pemilihan DPD RI dapil Provinsi Bali tahun 2019. Dengan nomor undi 8, Bambang Santoso berhasil meraih kursi kemenangan pada pemilihan DPD RI dapil Provinsi Bali. Sebelum menjadi perwakilan Bali di parlemen, Bambang Santoso merupakan Pimpinan Wilayah (PW) Dewan Masjid Indonesia (DMI) yang selama masa jabatannya digadagadag sebagai media penyambung lidah masyarakat muslim Bali.

Hubungan Antara PKS dengan Mobilisasi Massa Melalui Mudjiono

PKS sebagai partai modular menggunakan aktor penghubung untuk memperluas jaringan pemilihnya dengan cara mengajak tokoh masyarakat muslim Kota Denpasar bergabung dengan PKS dan menjadikannya caleg dengan nomor urut 1 pada pemilihan legislative Kota Denpasar tahun 2014. Tokoh muslim yang dimaksud ialah Umar Dany dan Nuh Fatah. Umar Dany merupakan kepala dusun di Desa Wanasari dan Nuh Fatah adalah ketua Yayasan Al-Muqorrobin. Selain untuk memperluas jaringan pemilih, strategi ini juga dianggap lebih efisien dan meminimalisir biaya kampanye karena pendanaan PKS yang terbatas.

PKS terkenal sebagai partai islam dengan basis massa yang kuat. Namun, ketika terjadi konflik, konstituen utama PKS terpecah menjadi 2 kubu. Kubu pertama bertahan di PKS, kubu kedua mengikuti Mudjiono. Konflik ini bermula pada tahun 2004 yang dimana muncul faksi pada tubuh PKS, yakni faksi keadilan dan faksi sejahtera. Sejak saat itu PKS mulai sering mengalami konflik dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 ketika beredar dokumen yang mewaspadai gerakan meng kudeta PKS. Hal ini memberi dampak pada kepengurusan PKS Provinsi Bali yakni *reshuffle* sepihak yang mengakibatkan Mudjiono digantikan oleh Hilmun Nabi.

Ketika terjadi perpecahan dengan partai modular, aktor penghubung akan tetap menjalin hubungan dengan jaringan pemilihnya karena aktor penghubung pada *modular parties* adalah pemilik mutlak dari jaringan pemilih. Pemilih terikat pada partai hanya karena hubungan yang dimilikinya

dengan aktor penghubung sehingga pilihan pemilih dapat berubah-ubah. Mudjiono yang bertindak sebagai aktor penghubungpun harus tetap menjaga ikatan emosional dengan jaringan pemilihnya karena hal ini yang menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan jaringan yang dimilikinya. Adanya perasaan yang sama atas ketidakadilan yang dirasakan oleh eks kader PKS menguatkan ikatan emosional mereka dengan Mudjiono. Kemampuan Mudjiono dalam mempengaruhi banyak orang karena memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas semakin meyakinkan loyalisnya untuk tetap berada di sisi Mudjiono. Selain faktor ketokohan Mudjiono dalam memimpin PKS, terbentuknya faksi juga menjadi faktor ikatan kuat Mudjiono dengan loyalisnya. Mudjiono merupakan bagian dari faksi keadilan yang memiliki keinginan untuk menjadikan PKS sebagai partai yang modern dan terbuka atau disebut dengan konsep Arah Baru Indonesia (ABI). Pandangan ini yang juga diamini oleh loyalis Mudjiono yang dimana sebagian dari loyalis Mudjiono adalah kader yang juga merupakan bagian dari faksi sejahtera. Dengan ikatan emosional ini, Mudjiono mampu memulai sekaligus memimpin gerakan untuk mengundurkan diri masal dari Partai PKS. Sedikitnya terdapat 4.600 kader serta pengurus yang ikut mengundurkan diri. Pengurus dan kader yang mengundurkan diri tersebut kemudian bergabung menjadi bagian dari Garbi (Gerakan Arah Baru Indonesia) yang kini telah resmi menjadi Partai Gelora.

Saat aktor penghubung beralih, kerusakan yang mereka timbulkan pada pihak sebelumnya lebih besar. Tidak hanya

menghalangi pihak sebelumnya ke akses mantan pendukung, aktor penghubung juga memobilisasi jaringan mereka untuk melawan pihak sebelumnya. Kalkulasi yang dilakukan oleh Mudjiono ketika ia keluar dari PKS pun telah diperhitungkan dengan matang. Mudjiono mengadakan diskusi rutin serta mengundang media massa pada 28 September 2018 ketika ia dan loyalisnya keluar dari PKS sehingga keluarnya pengurus PKS Bali menjadi perhatian nasional. Pesan yang hendak disampaikan melalui media massa ketika Mudjiono dan loyalisnya keluar ialah untuk melepaskan stigma ke-PKS-an yang melekat dan menekankan ketidaksetujuan pengurus dengan cara perjuangan yang dilakukan oleh Partai PKS. Selain itu, Mudjiono ingin membuka jalan bagi pengurus PKS dari provinsi lain yang tidak sependapat dengan DPP PKS untuk berani bersuara. Keberhasilan penggunaan media massa ditunjukkan dengan menjamurnya gerakan mundur massal oleh pengurus PKS seperti di PKS Banyumas sebanyak 80 orang mengundurkan diri dan puluhan pengurus juga mundur di PKS Sumatera Utara.

Berbeda dengan Mudjiono, Ilham Ahmad selaku Ketua DPD PKS Kota Denpasar menganggap bahwa konflik yang terjadi pada tubuh partai adalah hal yang lumrah terjadi sehingga keluarnya Mudjiono dan loyalisnya dianggap hal yang wajar sebagai bentuk kekecewaan. Namun, keluarnya Mudjiono memberikan dampak buruk pada PKS yang kala itu sedang berjuang di perhelatan pemilihan legislative tahun 2019. PKS sebelumnya tidak pernah absen dari kursi DPRD Kota Denpasar bahkan

mengalami peningkatan jumlah kursi pada tahun 2014 harus merasakan kekalahan dengan tidak adanya kursi bagi kader PKS di Kota Denpasar tahun 2019. Kemampuan Mudjiono dalam merawat ikatan dengan loyalisnya menjadi salah satu faktor menurunnnya suara PKS, terutama di dapil Denpasar Utara.

Keberhasilan Mudjiono dalam mempertahankan loyalisnya membuktikan kekuatannya sebagai seorang broker atau aktor penghubung dalam *modular parties*. Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ada banyak partai politik besar di Bali yang mengajaknya bergabung, seperti PDIP, Demokrat serta Golkar. Namun, Mudjiono enggan bergabung dengan partai politik manapun ketika pemilihan legislative 2019. Mudjiono merasa partai politik yang ada tidak sesuai dengan pandangan politiknya. Selama ini, stigma yang beredar di masyarakat adalah partai politik yang nasionalis bukanlah partai politik islamis, begitu juga sebaliknya.

Ketidakikutsertaan Mudjiono pada partai politik menyebabkan jaringan pemilihnya tidak dapat memutuskan secara pasti keberpihakannya pada pemilihan anggota DPRD Kota Denpasar tahun 2019. Mudjiono menyebutkan bahwa ia sengaja membiarkan massanya “mengambang” ketika tidak berafiliasi dengan partai politik manapun kala pemilihan DPRD Kota Denpasar 2019. Mudjiono memberikan keleluasaan pada jaringan pemilihnya untuk menentukan pilihan pada pemilihan DPRD yang berlangsung. Sikap Mudjiono yang tidak menentukan pilihan ini, tidak lain adalah bentuk *in-action*

yang didasari pada sikap penundaan sembari menggali informasi lain. Mudjiono melakukan bentuk *calculated inaction* serta *ideological inaction* dalam melakukan perannya sebagai aktor penghubung. Pertama, disebut *calculated inaction* karena Mudjiono secara sadar tidak mengeluarkan pernyataan atas dukungannya pada partai politik manapun. Hal ini ditegaskan dengan ditolaknya berbagai partai politik besar yang memberikannya tawaran untuk bergabung. Keluarnya Mudjiono dari PKS serta tidak adanya partai politik yang didukung oleh Mudjiono menyebabkan massanya tidak dapat menentukan pilihan dengan pasti. Kedua, dikategorikan sebagai *ideological inaction* karena Mudjiono melakukan hal tersebut berdasarkan keyakinan dan pendiriannya. Mudjiono memilih untuk tidak memberikan pernyataan karena ingin menegaskan sikapnya bahwa ia keluar dari PKS sebagai bentuk kekecewaan dan perbedaan cara berfikir. Mudjiono bahkan memilih tidak bergabung dengan partai politik besar karena merasa pemikirannya hanya akan sesuai jika ia membuat partai baru dengan ideologi yang dipegangnya. Dengan sikap ini, Mudjiono mendapatkan simpati dari loyalisnya.

Hubungan Antara Bambang Santoso dengan Mobilisasi Massa Melalui Mudjiono

Aktor penghubung dapat berada diantara partai modular dan juga aktor personal yang dibuktikan dengan pada pemilihan legislative 2019, Mudjiono memilih untuk membantu aktor personal yakni Bambang Santoso di DPD RI dapil Provinsi Bali. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa loyalitas sifatnya

fluid karena Mudjiono berhasil mengalihkan dukungan jaringan pemilihnya dari PKS menjadi dukungan personal pada Bambang Santoso. Dalam mengalihkan dukungannya, aktor penghubung hanya akan mendukung calon yang dapat menguntungkan dirinya. Ini menunjukkan bahwa mobilisasi massa yang terjadi sifatnya rasional karena dihasilkan dari berbagai kalkulasi menguntungkan.

Bambang Santoso dan Mudjiono sebelumnya telah saling mengenal melalui organisasi MUI. Bambang Santoso menggaet Mudjiono yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPW PKS Bali untuk bekerja sama melakukan tendem di pileg 2019. Tendem dimaksudkan untuk memudahkan Bambang Santoso untuk memperkenalkan diri sebagai calon DPD RI dapil Bali ketika melakukan kampanye di Provinsi Bali karena PKS dianggap sebagai partai islam besar dengan basis suara yang besar. Konflik internal yang terjadi di tubuh PKS menyebabkan Bambang Santoso tidak lagi melanjutkan kerjasama dengan PKS secara terbuka dan memilih berafiliasi dengan kepengurusan Mudjiono. Faktor kedekatan, faktor pengalaman serta basis pemilih Mudjiono adalah alasan Bambang Santoso memilih berafiliasi dengan Mudjiono.

Aktor penghubung tidak berpindah ke politisi lain untuk meningkatkan peluang mengesahkan kebijakan tetapi untuk mempertahankan asset politik berharganya dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dengan menggunakan kemampuan untuk memobilisasi pemilih ke politisi tingkat atas. Keberpihakan Mudjiono atas Bambang Santoso merupakan hasil dari kalkulasi

menguntungkan yang dilakukan Mudjiono. Potensi Bambang Santoso yang merupakan tokoh islam satu-satunya di pemiliha DPD RI dapil Provinsi Bali menjadi salah satu daya tawar yang dimiliki Bambang Santoso. Selain itu, *track record* Bambang Santoso di masyarakat memenuhi kriteria kelayakan sebagai seorang pemimpin dengan citra yang baik. Mudjiono juga menggunakan Bambang Santoso untuk mempertahankan *power*-nya terhadap jaringan pemilih karena semakin dekat dengan kekuasaan maka aktor penghubung akan semakin dipercaya oleh pengikutnya.

Mudjiono terlibat aktif dalam proses kampanye Bambang Santoso sebagai koordinator saksi Bambang Santoso se-Bali. Berbekal pengalaman selama memimpin PKS, Mudjiono rutin dijadikan narasumber bagi tim pemenangan bahkan tempat pribadi Mudjiono digunakan sebagai markas saksi Bambang Santoso. Penekanan yang kuat terhadap ketokohan, ide serta sumber daya adalah kunci yang dipegang oleh Mudjiono dalam membantu memenangkan Bambang Santoso. Penguatan dalam hal ketokohan dilakukan dengan membentuk kesan bahwa Bambang Santoso adalah tokoh islam yang dibutuhkan oleh masyarakat muslim di Bali. Terlebih mayoritas penduduk di Bali adalah beragama Hindu sehingga aspirasi akan lebih mudah tersampaikan jika memiliki wakil dengan identitas yang sama di parlemen. Penggunaan tagline “Bersatu Untuk Umat dan Bangsa” akhirnya dipilih untuk mewakili visi, misi serta pokok-pokok program kerja yang utamanya menysasar masyarakat muslim di Bali.

Bambang Santoso pada akhirnya berhasil mengalahkan 18 pesaingnya yang notabene berasal dari kaum mayoritas Hindu Bali termasuk calon *incumbent* Anak Agung Ngurah Oka Ratmandi, S.H., M.Si. Perolehan suara Bambang Santoso di 9 kabupaten di Bali dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Kabupaten	Perolehan Suara
1	Denpasar	36.954
2	Jembrana	26.963
3	Buleleng	24.932
4	Badung	13.430
5	Karangasem	10.091
6	Tabanan	6.672
7	Klungkung	3.439
8	Gianyar	2.364
9	Bangli	1.255
Total		126.100

Sumber: KPU Provinsi Bali

Walaupun mendapat suara terbanyak di Kota Denpasar, nyatanya perolehan suara ini belum sesuai dengan target suara yang telah ditentukan. Bambang Santoso hanya mendapatkan 36.954 suara sah dari 90.000 suara yang ditargetkan. Konflik yang terjadi mengakibatkan perpecahan antara pemilih muslim sehingga banyak dari pemilih muslim yang melakukan golput. Hal tersebut kemudian yang menjadikan pihak modular mempekerjakan broker atau aktor penghubung sebanyak-banyaknya demi memperluas jaringan pemilihnya. Selain menjaga hubungan personal dengan Mudjiono agar tetap memiliki ikatan dengan loyalis Mudjiono, Bambang Santoso juga menjalin hubungan dengan PKS demi bisa merangkul jaringan pemilih lainnya. Hubungan yang terjalin ini dilakukan dengan cara mengikutsertakan loyalis Mudjiono serta loyalis PKS ke dalam struktur organisasi kerja.

Sebanyak 2 loyalis Mudjiono dan 1 loyalis PKS dijadikan staff ahli Bambang Santoso di DPD RI dapil Provinsi Bali.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan dapat disimpulkan hubungan antara PKS dan Bambang Santoso dengan mobilisasi massa melalui Mudjiono sesuai dengan teori *modular parties* oleh Lucas Martin Novaes, yakni pertama, hubungan PKS dengan mobilisasi massa melalui Mudjiono yang awalnya saling menguntungkan kemudian mengalami perubahan ketika terjadi konflik di tubuh PKS. PKS yang tidak mampu memegang massa sendiri karena biaya yang mahal memerlukan aktor penghubung yang telah memiliki modal sosial berupa jaringan pemilih. PKS menggunakan tokoh masyarakat muslim Kota Denpasar untuk meraih kursi di DPRD Kota Denpasar. Namun, ketika hubungan yang terjalin antara PKS dengan Mudjiono tidak lagi saling menguntungkan, aktor penghubung dapat mengalihkan jaringan pemilihnya karena terdapat proposal yang lebih menguntungkan. Pada pemilihan legislative 2019, Mudjiono memilih keluar yang menyebabkan kerugian bagi PKS karena tidak lagi memiliki kursi di DPRD Kota Denpasar.

Kedua, hubungan yang terjalin antara Bambang Santoso dengan mobilisasi massa melalui Mudjiono adalah hubungan yang saling menguntungkan. Adanya ikatan emosional yang terbentuk antara Mudjiono dengan jaringan pemilihnya menguntungkan Bambang Santoso dalam memobilisasi

massa. Mudjiono juga meraih keuntungan dengan hubungan yang terjalin karena semakin dekat dengan kekuasaan maka semakin kuat pula ikatannya dengan jaringan pemilih.

Hasil penelitian ini juga mengungkapkan bahwa baik PKS, Bambang Santoso maupun Mudjiono sama-sama memiliki kepentingan politik. PKS dan Bambang Santoso menggunakan Mudjiono untuk mendapatkan suara dari jaringan pemilih yang dimilikinya. Terlihat ketika Mudjiono berada di PKS ia mampu membawa kadernya lolos di DPRD Kota Denpasar dan berhasil memenangkan Bambang Santoso di DPD RI dapil Provinsi Bali. Sedangkan, Mudjiono menggunakan Bambang Santoso dan PKS sebagai alat untuk mempertahankan jaringan pemilihnya. Hubungan ini memenuhi kriteria patron-klien yang saling menguntungkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

KPU Kota Denpasar.

BUKU

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Muhtadi, B. 2019. *Populisme, Politik Identitas & Dinamika Elektoral*. Malang: Intrans Publishing.
- Suyanto, B., Sutinah, Dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Upe, A . 2017. *Metode Penulisan Sosial*. Jakarta: Literacy Institute.

JURNAL

- Adah, E. 2017. Komunikasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Keterbukaan

- Ideologi. *Jurnal Kajian Ilmu Komunikasi*. 5(1) : 43-52.
- Amalia, L. 2013. Evaluasi Sistem Kepartaian. *Jurnal Penelitian Politik*. 10 (2): 145-161.
- McConnell, A., Hart,P. 2019. *Inaction and Public Policy: Understanding Why Policymakers 'Do Nothing'*. *Policy Sciences* 52: 645-661
- Nurjaya, dkk. 2017. Dinamika Partai Keadilan Sejahtera di Denpasar Tahun 1998-2014. *Jurnal Humanis Fakultas Ilmu Budaya Unud*, 18 (2): 75-80.
- Nuswantoro, R. 2013. Media Massa dalam Situasi Konflik: dari Bandwagon Effect sampai Peace Narrative. *Jurnal Komunikasi Universitas Gajah Mada* 6(1): 503-516.
- Wirawan, A. Dewi,S. 2018. Dinamika Politik Identitas Masyarakat Muslim Bali Pada Pilgub Bali Tahun 2018. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dari Penelitian Sosiologi*. 3(1): 40-57.
- SKRIPSI, TESIS & DISERTASI**
- Basyir, A. 2014. *Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sosial (PKS): Antara Gerakan Tarbiyah dan Pragmatisme*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Fakultas Syari'ah Dah Hukum
- Harefa, N. 2019. *Faksi Dalam Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Di Provinsi Bali*. Universitas Udayana: FISIP.
- Jordi, I. 2020. *Peran Banteng Ambengan Pesanggaran (Bantas) Dalam Politik dan Ekonomi Di Desa Pedungan*. Universitas Udayana : FISIP.
- Motius, H. 2021. *Metamorfosis Gerakan Arah Baru Indonesia Menjadi Partai Gelombang Rakyat Indonesia Di Provinsi Bali*. Universitas Udayana : FISIP.
- Novaes, L. M. (2015). *Modular parties: Party System With Detachable Clienteles*, UC Berkeley Electornic Theses and Dissertation.
- SUMBER INTERNET**
- Antara Sumut, 2018. *Puluhan Pengurus PKS Langkat Mengundurkan Diri*. Diakses pada <https://sumut.antaranews.com/berita/180893/puluhan-pengurus-pks-langkat-mengundurkan-diri> tanggal 20 Juni 2021.
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Proyeksi Penduduk Kota Denpasar (Jiwa) 2018-2020*. Diakses pada <https://denpasarkota.bps.go.id/indicator/12/49/1/proyeksi-penduduk-kota-denpasar.html> tanggal 4 Juni 2021.
- Badan Koordinasi dan Penanaman Modal, 2017. *Profil Provinsi Bali*. Diakses pada <https://regionalinvestment.bkpm.go.id> tanggal 25 Juli 2021.
- Denpasar Kota, 2019. *Selayang Pandang Kondisi Kemasyarakatan*. Diakses pada <http://www.denpasarkota.go.id/page/read/41> tanggal 4 Juni 2021.
- Kata Data, 2019. *Partai Garbi, Pecahan PKS yang Dimotori Fahri Hamzah dan Anis Matta*. Diakses pada <https://katadata.co.id/hariwidowati/berita/5e9a503ba4b8a/partai-garbi-pecahan-pks-yang-dimotori-fahri-hamzah-dan-anis-matta> tanggal 16 Juni 2021.
- Kemenag Bali, 2020. *Jumlah Umat Beragama di Kota Denpasar*. Diakses pada <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/artikel/jumlah-umat-beragama-di-kota-denpasar> tanggal 4 Juni 2021.
- KPU-denpasarkota, 2018. *Usulan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) dan Alokasi Kursi Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Denpasar*. Diakses pada <https://www.kpu-denpasarkota.go.id> tanggal 4 Juni 2021.
- Nusa Bali.com, 2019. *Bambang Santoso Kejutkan 4 Besar DPD RI Dapil Bali (Online)*. Diakses melalui <https://nusabali.com> pada 10 Agustus 2020.
- Okezone News, 2018. *Pengurus di Banyumas Mundur Massal, PKS Yakin Tak Akan Gerus Suara*. Diakses pada <https://news.okezone.com/read/2018/10/25/512/1969056/pengurus-di-banyumas-mundur-massal-pks-yakin-tak-akan-gerus-suara> tanggal 20 Juni 2021.
- Partai Keadilan Sejahtera. 2014. *PKS Berterima Kasih Anggota DPRD asal*

PKS Meningkat di Bali. Diakses pada <<https://pks.id/content/pks-berterima-kasih-anggota-dprd-asal-pks-meningkat-di-bali>> tanggal 1 November 2020.

SIPPa Online, 2018. *Profil Kota Denpasar*. Diakses pada <https://sippa.ciptakarya.pu.go.id> tanggal 4 Juni 2021.

Tirto.id, 2018. *Alasan Mundurnya Seluruh Pengurus dan Kader PKS Bali*. Diakses pada <https://tirto.id/alasan-mundurnya-seluruh-pengurus-dan-kader-pks-bali-c3yG> tanggal 21 Januari 2021.